

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata wakaf berasal dari kata *waqafa* dengan makna berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri atau penahanan. Sedangkan wakaf menurut bahasa arab berarti *al-habsu*, yang berasal dari kata kerja *habasa*, *yahbisu*, *habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan, kemudian kata ini berkembang menadi *habasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah SWT.¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda dari miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam.²

Salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mempunyai nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Sebagai bagian dari ajaran tauhid, yang berarti bahwa segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah SWT. Lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip pemilikan harta dalam Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan dikuasai oleh sekelompok orang tertentu sehingga mengakibatkan kesenjangan sosial.³

¹Fuad Irfan al-Bustani, *Manjid al-Lughoh* (Beirut : Dar al-Masriq), Cet, ke-21, hal, 935.

²Kompilasi Hukum Islam, Buku III Bab I, Pasal 215, Poin (1).

³Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah (perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm 11.

Islam memandang bahwa harta bukanlah milik pribadi. Pemilik harta yang hakiki adalah Allah SWT Manusia hanyalah sebagai pemegang amanah atas harta itu. Dalam surat Al-Hadid ayat 7, Allah SWT berfirman:

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”. (Q.S. Al-Hadid: 7)

Ketika orang yang berwakaf telah melakukan sesuatu yang menunjukkan wakaf atau telah mengucapkan lafal wakaf, maka wakaf bersifat mengikat. Asalkan diiringi dengan syarat, orang yang berwakaf termasuk orang yang absah tindakannya karena telah memenuhi beberapa syarat seperti memiliki akal, sehat jasmani dan rohani, sudah balig, merdeka, dan bebas menentukan kehendaknya. Apabila wakaf telah mengikat, maka ia tidak boleh dijual, ihibahkan, atau dilakukan kepadanya tindakan yang dapat menghilangkan kewakafannya. Dan jika orang yang berwakaf meninggal, maka benda yang diwakafkan tidak dapat diwariskan.⁴ Sebab yang demikian inilah yang dikehendaki oleh wakaf.⁵

Di Indonesia, hukum dikatakan sebagai “rangkaian kaidah, peraturan, tata aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan atau mengatur hubungan antara masyarakat”.⁶ Wakaf merupakan salah satu bagian dari hukum, ia mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang social

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Penerbit Pena Pandi Aksara, 2008), hal. 346.

⁵Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 65.

⁶Van Hoeve, *Ensiklopedi Indonesia*. (Jakarta: Ichtiar Baru, 1982) hal. 1344

ekonomi masyarakat muslim. Wakaf selain berdimensi ubudiyah ilahiyah, ia juga berfungsi social kemasyarakatan.

Tidak diragukan lagi bahwa wakaf termasuk ibadah, dalam arti bahwa seorang muslim mewakafkan harta benda yang dimilikinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, agar mendapatkan ridho-nya. Hal tersebut menunjukkan bahwa berwakaf merupakan wujud dari ketaatan dan ketundukkan kepada-Nya.⁷

Pengaturan perwakafan di Indonesia, pada dasarnya sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat dalam BAB III Tentang Hukum Perwakafan, namun dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak kekurangan mengingat kedudukan Kompilasi Hukum Islam hanya dalam bentuk Intruksi Presiden yang tentunya tidak mengikat. Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf selanjutnya disebut Undang-Undang Wakaf merupakan saat yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang selama ini menggeluti masalah perwakafan, baik di lingkungan akademisi maupun praktisi.⁸

Secara keseluruhan Undang-Undang Wakaf, telah mencakup berbagai aspek permasalahan tentang wakaf yang menjadi persoalan di negara ini. Undang-Undang Wakaf ini mengharuskan dalam setiap perwakafan harus dicatatkan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (2), yaitu: “Ikrar Wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh

⁷Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hal. 38.

⁸Uswatun Hasanah, *Wakaf dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, dalam Jurnal BWI AL-WAQF, volume 1 No. 1, Desember 2008, hlm 9.

PPAIW.” Akta Ikrar Wakaf (AIW) dibuat untuk menciptakan kepastian hukum terhadap tanah wakaf tersebut.

Sebelum adanya ketentuan yang mengatur tentang perwakafan, masyarakat Indonesia terbiasa melaksanakan perwakafan dengan sistem tradisional yang mengutamakan rasa saling percaya, karena pada dasarnya benda wakaf merupakan amanah yang perlu dijaga. Konsep saling percaya tersebut, membuat dalam pelaksanaannya ikrar wakaf hanya dilakukan secara lisan di depan ketua adat atau tokoh ulama tanpa harus dicatatkan. Hal ini, berdampak pada permasalahan status hukum terhadap tanah wakaf tersebut dikemudian hari, bahkan mengakibatkan terjadinya sengketa terhadap tanah tersebut karena kebutuhan terhadap tanah di zaman sekarang yang semakin tinggi.

Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 27 Oktober 2004 telah mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.⁹

Perwakafan tanah milik didasarkan atas ketentuan Undang-Undang tersebut. Diharapkan dengan berlakunya undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ini, dapat memenuhi hakikat dan tujuan dari perwakafan itu.

Praktek perwakafan di Indonesia dapat kita temui pada perwakafan tanah untuk sarana ibadah, pendidikan dan sarana umum. Objek yang umum diwakafkan dalam masyarakat muslim Indonesia adalah tanah dan bangunan, hingga pemerintah memandang perlu untuk mengatur dalam sebuah Undang-

⁹ Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta, Harvarindo, 2005, hal V.

Undang. Undang-undang yang mengatur perwakafan adalah Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 tahun 1977, Intruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang khusus mengatur pelaksanaan UU tentang wakaf.¹⁰

Pengaturan Wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf dan didaftarkan serta diumumkan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Adapun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Walaupun menurut Hukum Islam perwakafan telah terjadi ketika adanya pernyataan wakif yang merupakan ijab, karena perbuatan wakaf dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak, namun, secara hukum positif pelaksanaan wakaf harus dilakukan dengan Ikrar yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan dua orang saksi serta harus dibuat dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf.

¹⁰Kemenag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Dirjen Bimas Islam, 2012) hal. 14.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, prosedur wakaf yang dilakukan tidak cukup dengan akad wakaf yang dilakukan secara lisan saja. Untuk menjamin kepastian hukum, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 mengharuskan wakaf dilakukan secara lisan dan tertulis di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk selanjutnya dibuatkan Akta Ikrar Wakaf. Akta Ikrar Wakaf ini diajukan ke Badan Pertanahan Nasional untuk diubah menjadi sertifikat wakaf. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf :

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
2. Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sejumlah tanah wakaf harus ditertibkan dan diadministrasikan atau disertifikasikan, hanya saja dalam praktiknya masalah sertifikasi tanah wakaf di Indonesia masih sering ditemui tanah wakaf yang tidak disertifikasikan. Oleh sebab itu akan timbul masalah karena tidak sesuai dengan peraturan-peraturan. Hal ini terdapat tujuan pentafsiran hukum syari'at Allah adalah sebagai kemaslahatan manusia (masalahah).¹¹

Sertifikasi tanah wakaf diperlukan demi tertib administrasi wakaf dan kepastian hukum bila terjadi sengketa atau masalah hukum. Sertifikasi tanah wakaf dilakukan secara bersama oleh Departemen Agama dan Badan Pertanahan

¹¹Abdu al-Qadir Audah, *Al-tasyri 'Al-Jina' I Al-Islami*, (Beirut: Dar al-Karib al-'Arabi, t.th), juz 1, hlm 8-9 Dalam http://marifatuna.blogspot.com/2010/10/teori-maqasid-al-syariah_18.html

Nasional (BPN). pada tahun 2004, kedua lembaga ini mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala BPN Nomor 422 Tahun 2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf. Proses serifikasi tanah wakaf dibebankan kepada Anggaran Departemen Agama.

Sertifikasi tanah wakaf dilakukan secara bersama oleh Departemen Agama, Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pada tanggal 23 Oktober 2004, Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawar bertemu Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Luthfi Ibrahim Nasution di Gedung Departemen Agama. Keduanya sepakat menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) perihal sertifikasi tanah wakaf. Menteri Agama mengeluarkan surat Nomor 3/SKB/BPN/2004. SKB ini ditandatangani delapan hari sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disahkan.

Implementasi dari Undang-Undang tersebut di Indonesia belum sepenuhnya terrealisasi masih banyak tanah wakaf yang belum di akta ikrar wakafkan dan di sertifikasi. Data yang terdapat dari informasi Badan Wakaf Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2016, luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 4.359.443.170,00 M², tanah wakaf seluas itu tersebar di 435.768 lokasi tanah wakaf di seluruh Indonesia. dan dari seluruh tanah wakaf wakaf tersebut belum seluruhnya sudah bersertifikat dari 435.768 lokasi terdapat 287.160 yang sudah bersertifikat dan 148.447 lokasi yang belum bersertifikat dan memiliki akta ikrar wakaf. Data tersebut diperoleh dari Badan lembaga wakaf yang terbentuk setelah adanya Peraturan Perundang-Undangan Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia.

Data tersebut merupakan hasil yang diperoleh dari proses pendataan tanah wakaf secara manual di seluruh Indonesia, yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan oleh tenaga KUA, kemudian direkapitulasi pada tingkat Kabupaten/Kota oleh Kementerian Agama, dan seterusnya hingga tingkat Nasional.

Sedangkan data sertifikasi dan pencatatan tanah wakaf data yang penulis dapatkan berdasarkan survei yang dilakukan penulis di Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Wakaf Yang Sudah Bersertifikat di Desa Padamulya

No	Jenis Wakaf	Lokasi	Luas (M ²)
1	Langgar/Mushola	7	809
2	Masjid	5	1.592
3	Madrasah	6	1.510

Sumber : Data Tanah Wakaf KUA Kecamatan Cihaurbeuti

Tabel 2. Wakaf yang Belum Bersertifikat di Desa Padamulya

No	Jenis Wakaf	Lokasi	Luas(M ²)
1	Langgar/Mushola	28	Tidak diketahui
2	Masjid	3	Tidak diketahui
3	Makam	1	Tidak diketahui
4	Madrasah	1	114,8
5	Yayasan	4	5.120

Sumber : Data Tanah Wakaf KUA Kecamatan Cihaurbeuti

Berdasarkan data diatas jumlah seluruhnya terdapat 50 lokasi tanah wakaf dan hanya 18 lokasi tanah wakaf yang sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf dan bersertikat, sedangkan sisanya sebanyak 32 tanah wakaf belum Bersertifikat.

Dari data diatas menunjukan jumlah tanah wakaf yang belum di akta ikrar wakaf dan disertifikasikan masih tinggi, penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf masih rendah, belum seluruhnya berjalan dengan efektif di Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. Ini merupakan masalah yang nyata terjadi di Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti kabupaten Ciamis, berangkat dari data diatas pada prakteknya masih banyak tanah wakaf yang tidak memiliki akta ikrar wakaf dan tidak disertifikasikan dan pasti timbul kendala-kendala yang terjadi pada tanah wakaf yang tidak memiliki akta ikrar wakaf dan tidak diseritifikasikan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana pengaruh yang efektif dan Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tetang Wakaf yang dilakukan di Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. Tentu seluruh tanah wakaf ini merupakan aset umat Islam yang perlu dikembangkan, dan didayagunakan secara professional dan amanah sehingga nantinya dapat memberikan kontribusi dalam mengentaskan kemiskinan yang melanda bangsa saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana faktor penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimana dampak tidak dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun secara sistematis tujuan yang ingin dicapai adalah;

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis
2. Untuk mengetahui penunjang dan penghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.
3. Untuk mengetahui dampak tidak dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti kabupaten Ciamis

D. Tinjauan Pustaka

Adapun skripsi yang membahas wakaf adalah.

1. *Efektivitas Pelaporan Nadzir kepada KUA di Singajaya Garut* oleh Astri Masropah Jamilah. Membahas tentang ketentuan pelaporan wakaf yang

ada pada Perundang-undangan dan Hukum Islam, mengetahui alasan nadzir tidak melaporkan pengelolaan wakafnya kepada Kantor Urusan Agama dan mengetahui faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam di Singajaya Garut.¹²

2. *Penjualan dan Perelokasian Tanah Wakaf (Studi kasus di Yayasan An Nisa Banjaran)* oleh M Firdaus Ibnu H. Membahas tentang masalah kepemilikan tanah wakaf dengan problematika bagaimana penjualan tanah wakaf yang terjadi di yayasan An-Nisa Banjaran dan perelokasian tanah wakaf tersebut.¹³
3. *Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam* oleh Fauzi Prehastama. Membahas tentang wakaf uang merupakan peluang baru bagi umat Islam Indonesia untuk mengelola dan mengembangkan suatu potensi dana umat yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi kaum muslimin dan melepaskan umat Islam dari kemiskinan.¹⁴
4. *Pelaksanaan Perubahan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/23/Tahun 2008 di KUA Kecamatan Cibiru* oleh Irfan Maulany. Membahas tentang masalah aspek data dan keterangan harta benda wakaf. Data dan keterangan harta

¹²Astri Masropah Jamilah *Efektivitas Pelaporan Nadzir Kepada KUA di Singajaya Garut*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2012)

¹³ M Firdaus Ibnu H *Penjualan dan Perelokasian Tanah Wakaf (Studi kasus di Yayasan An-Nisa Banjaran)*, (Bandung: UIN Sunang Gunung Djati Bandung, 2005)

¹⁴Fauzi Prehastama, *Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2011)

wakaf yang kurang jelas berpotensi menimbulkan masalah kedepan jika tidak sesuai prosedur.¹⁵

5. *Perubahan Status Tanah Wakaf dengan Berubahnya Nadzir (Studi Kasus Sengketa Wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah dengan Yayasan Al-Basyariyah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung)* oleh Jaunuar Solehuddin. Membahas untuk mengetahui latar belakang terjadinya ketetapan nadzir atas tanah wakaf Desa Bojongmalala kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Baleendah dengan Yayasan Al-Basyariyah, mengenai status tanah wakaf serelah berubahnya nadzir.¹⁶

Sedangkan dari hasil penelusuran yang telah dilakukan terhadap karya tulis atau skripsi belum ada yang secara khusus mengangkat tentang implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis yang meliputi tertib hukum, ruang lingkup, dan pengamanan harta wakaf, dan lokasi yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya bisa mengakibatkan hasil penelitian yang berbeda, sehingga penelitian ini akan berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada.

E. Kerangka Pemikiran

Islam mengajarkan wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang menduduki tempat penting, hal ini didasarkan pada aspek manfaat wakaf yang merupakan (shodaqoh jariyah) dengan pahala yang dapat berlangsung terus-

¹⁵Irfan Maulany *Pelaksanaan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/23/Tahun 2008 di KUA Kecamatan Cibiru*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2011)

¹⁶Januar Solehudin *Perubahan Status Tanah Wakaf dengan Berubahnya Nadzir (Studi Kasus Sengketa Wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah dengan Yayasan Al-Basyariyah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung)*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2005)

menerus bagi wakif, meskipun ia telah meninggal dunia, selama yang diwakafkan tersebut masih dapat diambil manfaatnya.

Secara konsepsi ajaran, wakaf dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tidak ada secara eksplisit menyebut tentang wakaf. jika ada bersifat umum. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihadi, bukan ta'abbudi, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat dan peruntukan dan lain-lain.

Meskipun demikian, ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih islam. Sejak masa khulafaur rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dengan metode penggalan hukum mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam islam ditetapkan sebagian hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad, seperti qiyas, maslahah mursalah dan lain-lain.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sejumlah tanah wakaf harus ditertibkan dan diadministrasikan atau disertifikasikan, hanya saja dalam praktiknya masalah sertifikasi tanah wakaf di Indonesia masih sering ditemui tanah wakaf yang tidak disertifikasikan. Oleh sebab itu akan timbul masalah karena tidak sesuai dengan peraturan-peraturan. Hal ini terdapat tujuan pentafsiran hukum syari'at Allah adalah sebagai kemaslahatan manusia (masalah).

Keterlibatan pemerintah untuk mengatur masalah perwakafan merupakan atas dasar kepentingan kemaslahatan (Maslahah Mursalah). Karena hal tersebut sudah menyangkut kepentingan umum (masyarakat banyak) jika tidak akan

menimbulkan ketidaktertiban, sesuai kaidah fiqhiyah “Pemerintah berkewajiban mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan kemaslahatan”.

Upaya pengamanan hukum wakaf, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di sebutkan bahwa untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatatkan dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan di daftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada menjadi diragu-ragukan kebenarannya. Oleh karena itu, setiap tahap dalam penelitian harus didasari pada suatu metode penelitian yang berfungsi sebagai arah yang tepat untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan.

Adapun metodologi penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan

gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan pengatura Perundang-Undangan dan teori yang relevan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang menyangkut teori wakaf ditinjau dari Fiqih dan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf. Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada Implementasi Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah meliputi :

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis

2. Faktor penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis
3. Dampak tidak dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis

4. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini subjek darimana data dapat di peroleh, Dan penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Yaitu para pegawai desa, pegawai KUA yang terdiri dari beberapa orang dan para wakif yang terdiri dari beberapa orang dan para nadzir yang terdiri dari beberapa orang.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder yaitu buku, makalah, jurnal termasuk website yang ada hubungannya dengan penelitian serta dokumen-dokumen yang berkenaan dengan pelaksanaan penelitian ini, baik berupa buku-buku, foto tulisan tulisan yang di sajikan oleh pihak Desa Padamulya.

Pemilihan sumber data dilakukan secara sengaja (*purposive*) atau *non probability sampling*, yang merujuk kepada tujuan rencana

penelitian. Yaitu sumber data dipilih dan ditentukan secara terbatas dan digunakan dalam penelitian berskala kecil. Dengan prosedur pemilihan seperti ini memberikan kemudahan karena bahan pustaka tersedia dengan jumlah yang sangat banyak dan beragam.¹⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Wawancara

Wawancara diajukan secara verbal, artinya wawancara bukan semata-mata merupakan proses tukar-menukar pembicaraan, akan tetapi merupakan proses untuk menukar informasi.

Wawancara penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang diantaranya kepada pihak pegawai kantor Desa Padamulya, Nadzir Wakaf Desa Padamulya dan Masyarakat Desa Padamulya.

b. Dokumentasi

Dokumen biasanya terbagi atas beberapa bagian dokumen, yang terdiri dari buku harian, surat pribadi, auto biograf. Dan dokumen resmi. Dokumen yaitu setiap bahan yang tertulis.

Dokumentasi penelitian ini diadakan dalam mengumpulkan data-data tertulis yang terdapat di Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti

¹⁷ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih* Jilid I, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 85

Kabupaten Ciamis, dengan masalah yang di teliti serta dokumen lain yang mendukung.

c. Studi Pustaka

Metode dalam penelitian ini penulis meneliti buku-buku yang ada berhubungan dengan skripsi ini.

6. Teknik analisis data

Analisis data penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu penulis berusaha memaparkan data sebagaimana adanya dengan melakukan kajian penafsiran data-data tersebut sehingga dapat menggambarkan permasalahan secara sistematis.

7. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menentukan tempat penelitian yaitu di wilayah administrasi Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, karena memudahkan bagi penulis dalam menjangkau daerah tersebut dan penulis akan lebih mudah dalam melaksanakan penelitian di tempat itu, sebab tempat penelitian tersebut dekat dengan tempat tinggal penulis. Dengan demikian penulis akan lebih leluasa melakukan penelitian ini.